



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
 JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Masalah Sampah Harus Selesai di APBD Perubahan

YOGYA (KR) - Pembahasan APBD Perubahan 2024 yang mulai bergulir menjadi pencermatan serius bagi kalangan dewan. Salah satunya perihal penanganan sampah yang harus mampu diselesaikan pada tahun ini melalui perubahan anggaran.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Indaruwanto Eko Cahyono, mengungkapkan beberapa target atau tahapan dalam penyelesaian sampah di Kota Yogya ternyata belum mampu dicapai. "Kepala daerah pernah merilih terkait target mulai awal April, Mei kemudian Juni. Namun ternyata sampai awal Juli permasalahan sampah belum selesai," ungkapnya.

Beberapa tahapan yang sudah ditargetkan selesai bulan kemarin antara lain pengembangan dan pembangunan tiga TPST yakni di Nitikan, Kranon dan Karangmiri. Selain itu juga kerja sama dengan Kabupaten Bantul melalui Intermediate Treatment Facility. Sesuai target tahapan itu bisa tuntas akhir Juni sehingga memasuki Juli sudah tidak ada persoalan sampah di Kota Yogya.

Ndaru, sapaan akrabnya, menambahkan dengan asumsi volume sampah yang mencapai 200 ton per hari, sampai hari ini bahkan masih ada depo yang meluber. Belum lagi keberadaan tumpukan sampah di jalan-jalan serta sungai menjadikan hambatan sapta

Indaruwanto Eko Cahyono
Ketua Fraksi PAN

KR-istimewa

pesona pariwisata. Jika itu terus dibiarkan maka akan muncul kebiasaan yang menjadi karakter buruk pada masyarakat Kota Yogya. "Perlu ada upaya terutama dengan refokusng APBD Perubahan 2024 ada infrastruktur dan program penanganan sampah terintegrasi. Menjadi paradok di mana Kota Yogya terdapat puluhan perguruan tinggi tentu banyak ahli yang bisa dilibatkan dalam permasalahan ini," urainya.

Selain sampah, berbagai aspek juga turut diungkapkan dalam menyikapi perubahan anggaran. Di antaranya menyangkut penanganan stunting hingga penguatan kegiatan posyandu dengan dukungan anggaran pemerintah. Begitu juga di bidang pendidikan agar kualitas guru ditingkatkan melalui berbagai program pembinaan. Bahkan alokasi Bosda untuk swasta dan jaminan pendidikan daerah perlu ditingkatkan mengingat angka kemiskinan di Kota Yogya masih besar.

"Hal yang tidak kalah penting juga ialah penyediaan lahan pemakaman. Keterbatasan lahan yang ada serta harganya yang selangit tentu sangat memberatkan warga miskin. Lahan pemakaman yang sudah tidak aktif perlu diinventarisir lagi guna menghindari kawasan kumuh dan permukiman liar," tandas Ndaru.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005